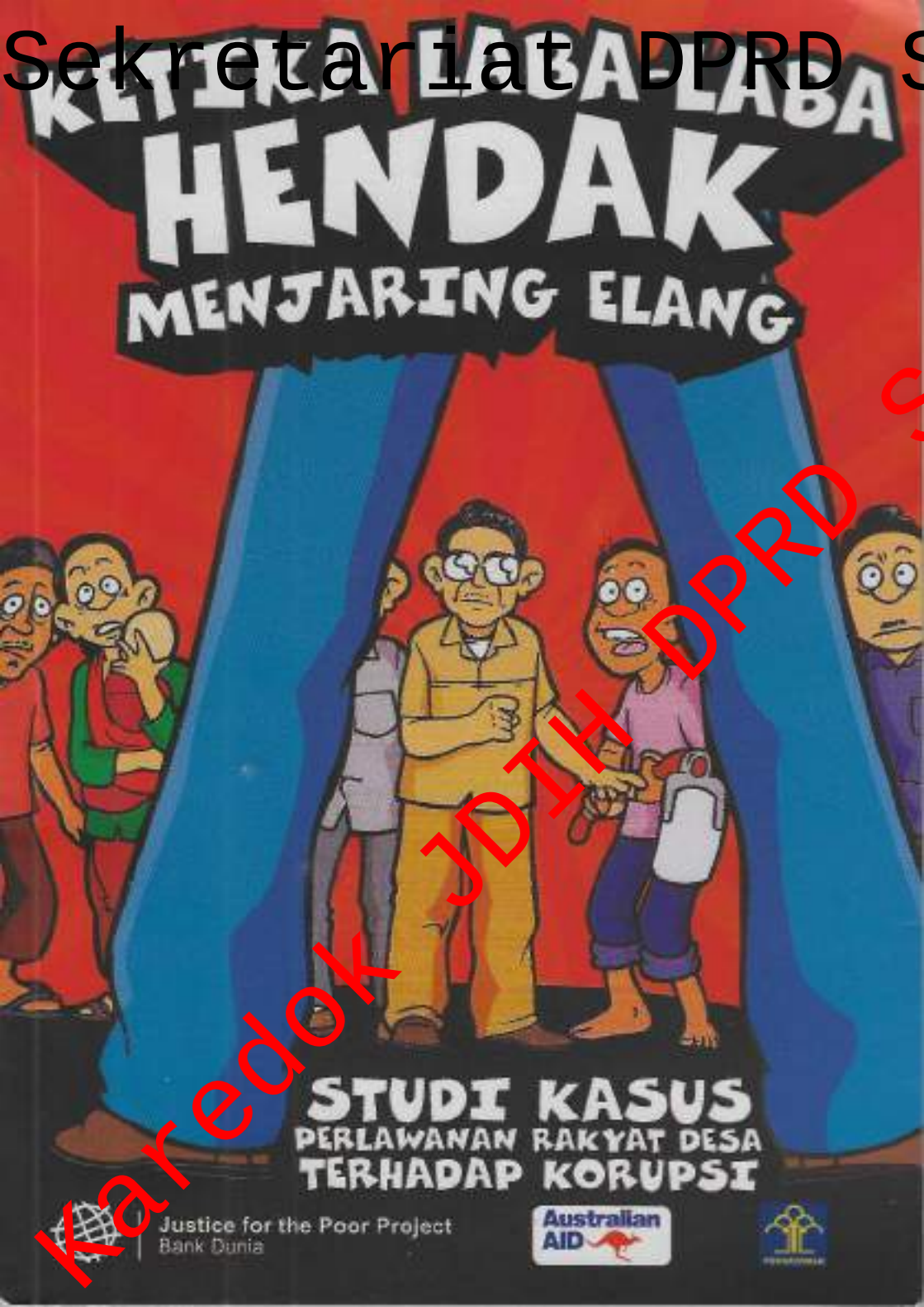
Sekretariat DPRD

KETIKA LABA-LABA HENDAK MENJARING ELANG



STUDI KASUS PERLAWANAN RAKYAT DESA TERHADAP KORUPSI

Justice for the Poor Project
Bank Dunia

Australian AID

Karedok JDIH DPRD S

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD

KETIKA LABA-LABA HENDAK MENJARING ELANG

Studi kasus perlawanan rakyat desa terhadap korupsi

Naskah
Tim Justice for the Poor & tim sebikom
Penulis Script
Ahmad F & M Gani
Story Board
Ismail [sebikom]
Pensil
F Udiyanto [sebikom]
Tinta
Verry & Ismail [sebikom]
Pewarnaan
Eko [sebikom]
Teks dan Tata Letak
Eko Jay [sebikom]
Disain Grafis
Eko Jay
sebikom@telkom.net

Editor & Supervisi
Peri Umar Farouk
Taufik Rashid

Diterbitkan oleh:
Justice for the Poor Project
The World Bank - Social Development Office

Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD

Pengantar

Penerbitan komik ini merupakan upaya mengkomunikasikan ke khalayak yang lebih luas pendekatan serta temuan *Justice for the Poor Project* Bank Dunia di mana masyarakat di tingkat pemerintahan yang paling bawah (desa/kecamatan) memproses keadilan bagi dirinya. Kali ini yang diketengahkan adalah salah satu kasus dalam rangka studi *Village Justice in Indonesia*. Sebuah kasus yang terjadi dan melibatkan warga di desa-desa di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, di mana seorang Camat melakukan korupsi dana bantuan pemerintah bagi pembangunan masyarakat dalam rangka Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Dari berbagai sudut pandang kasus Bukit Kemuning ini menarik. Yang paling menonjol, sebagaimana ditekankan dalam laporan analitis *Village Justice in Indonesia* adalah komplitnya faktor penunjang bagi berhasilnya masyarakat mengawal proses keadilan. Yakni adanya (i) pemimpin kasus, yang bisa diterjemahkan adanya tokoh atau kelompok yang mempunyai komitmen serta mau mempraktikkan tuntutan terhadap ketidakadilan; (ii) adanya mobilisasi di tingkat masyarakat, sehingga ada pembelajaran bersama mengenai pentingnya melawan ketidakadilan; (iii) adanya untuk dengan berbagai kelompok kepentingan yang independen yang dapat bermain di struktur kekuasaan setempat, sehingga dorongan publik untuk menyelesaikan kasus tersebut menjadi bertambah kuat; (iv) berhasil dibentuknya koalisi untuk mendorong penyelesaian kasus, sehingga setiap bagian dari lingkungan baik masyarakat, gerakan atau lembaga swadaya masyarakat, bantuan hukum, media massa serta aparat dan lingkungan berwibawa lain bergerak memaksimalkan perannya sehingga keadilan menjadi lebih mungkin; dan terakhir yang juga sangat penting (v) adanya reformis di dalam sistem hukum sehingga segala daya upaya yang hadir bagi kemungkinan keadilan menjadi tidak dimentahkan.

Semua pihak yang mengabdi pada penguatan akses masyarakat terhadap keadilan bisa belajar dan menemukan banyak hal dari kasus ini demi pengembangan dan dinamika gagasan, strategi serta praktek bantuan dan pendampingan di masyarakat ke depan.

Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD

Bagi masyarakat umum, tentunya yang paling mudah adalah bisa ditangkapnya kesadaran bahwa hal atau kegiatan sehari-hari yang biasa mereka lakukan yang mungkin dianggap sepele (*praxis*) dengan komitmen dan kesetiaan tertentu bisa berpengaruh pada cerita besar (*logos*) mengenai keadilan. Dalam kasus Bukit Kemuning ini, bisa dilihat: *ngerumpi*, *kongkow-kongkow*, rasa penasaran, tindakan memfotokopi serta kompak datang dan menghadiri proses pemeriksaan sampai peradilan menjadi sangat menentukan KEADILAN.

Harapan kami, pembuatan komik ini sendiri perlu diiringi dengan komitmen dan upaya terus menerus mencari terobosan yang memungkinkan keadilan bisa hidup di segala ruang dan waktu. Sehingga situasi dan perjuangan keadilan di Indonesia bukan merupakan fenomena *comical* (bahasa Inggris untuk lucu, menggelikan atau kocak), namun kenyataan serius yang bernyawa, menular dan hadir di mana-mana.

Jakarta, Maret 2005
Peri Umar Farouk
Koordinator Diseminasi
Justice for the Poor Project

Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



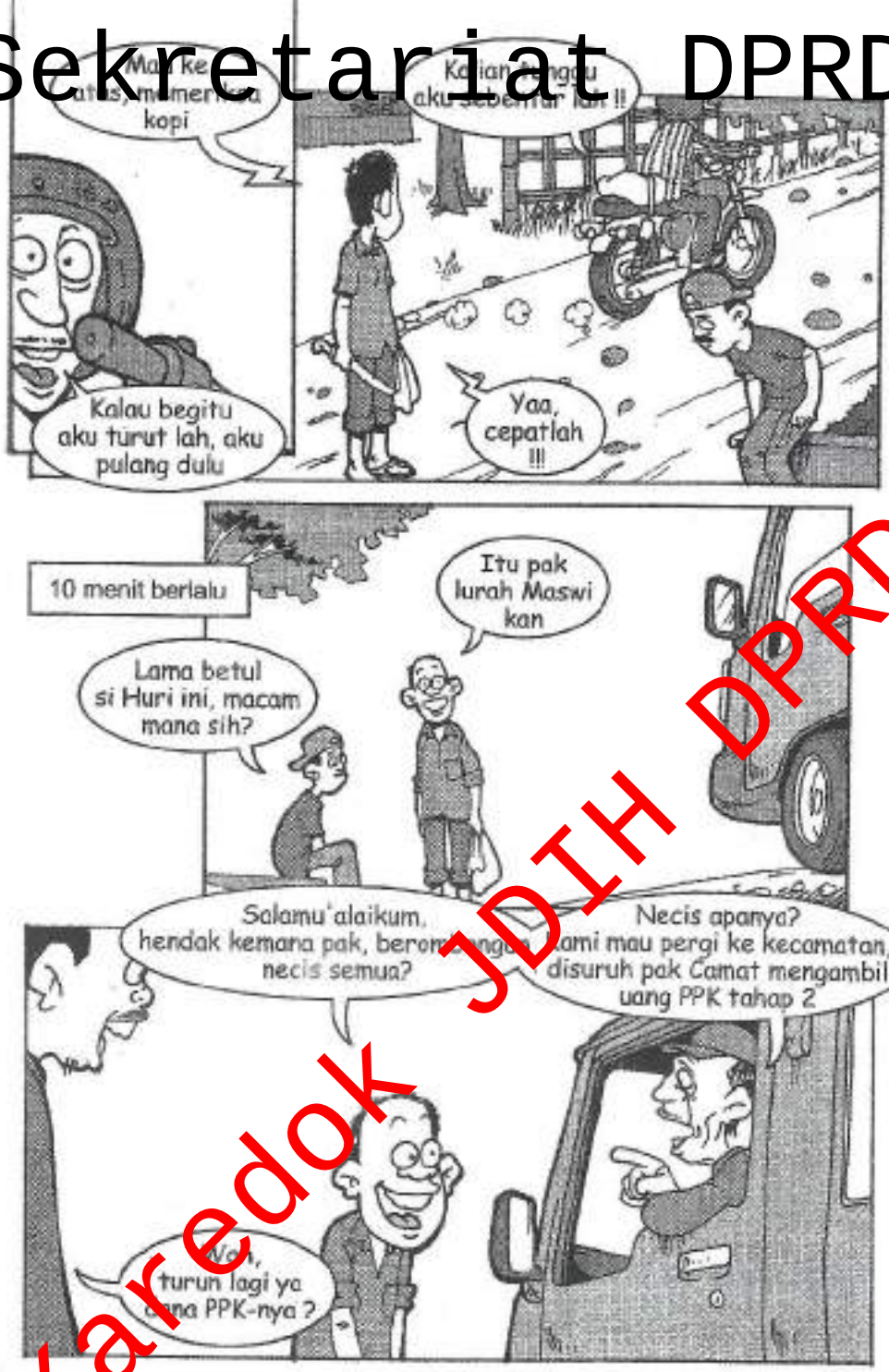
Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



JDIH DPRD
Karedok

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

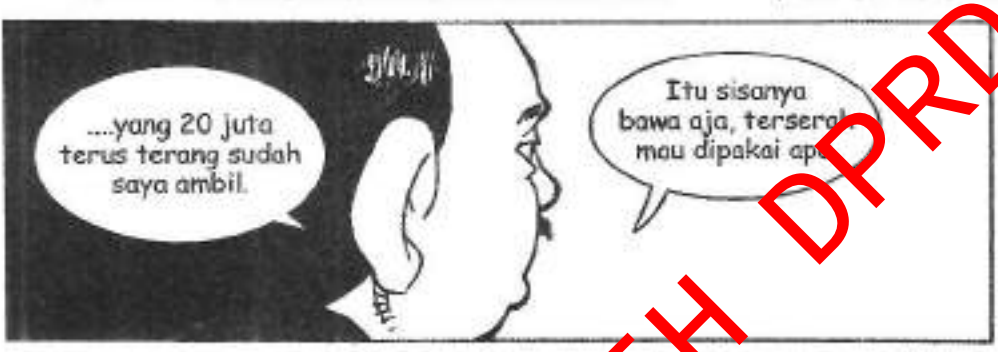
Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD

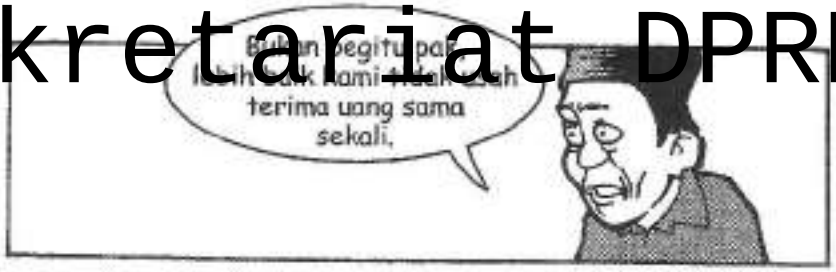






Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD









Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD









Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



JDIH DPRD
Karedok

Sekretariat DPRD



JDIH DPRD
Karedok

Sekretariat DPRD



JDIH DPRD
Karedok

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



JDIH DPRD
Karedok

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



JDIH DPRD
Karedok

Sekretariat DPRD





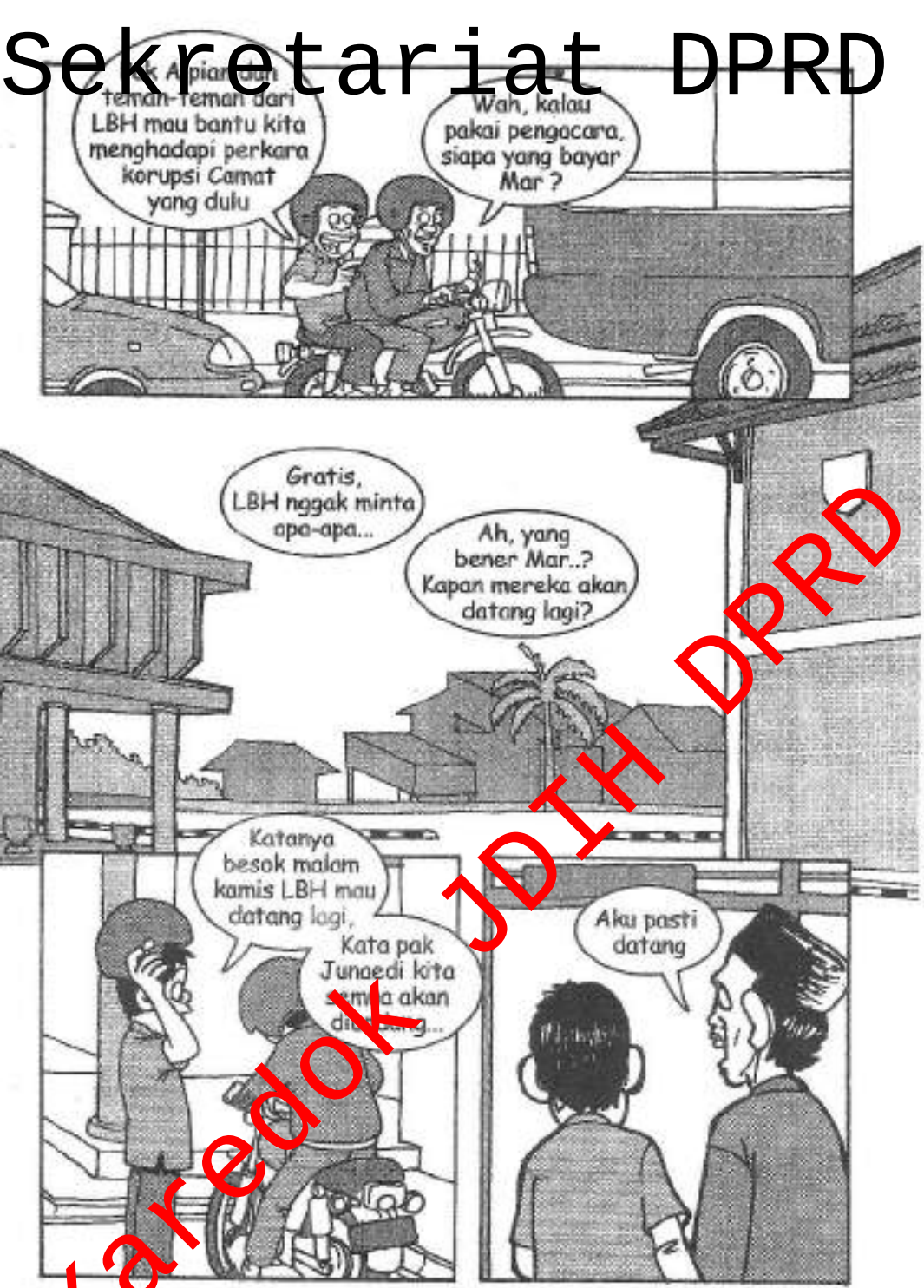
Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



JDIH DPRD
Karedok

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD







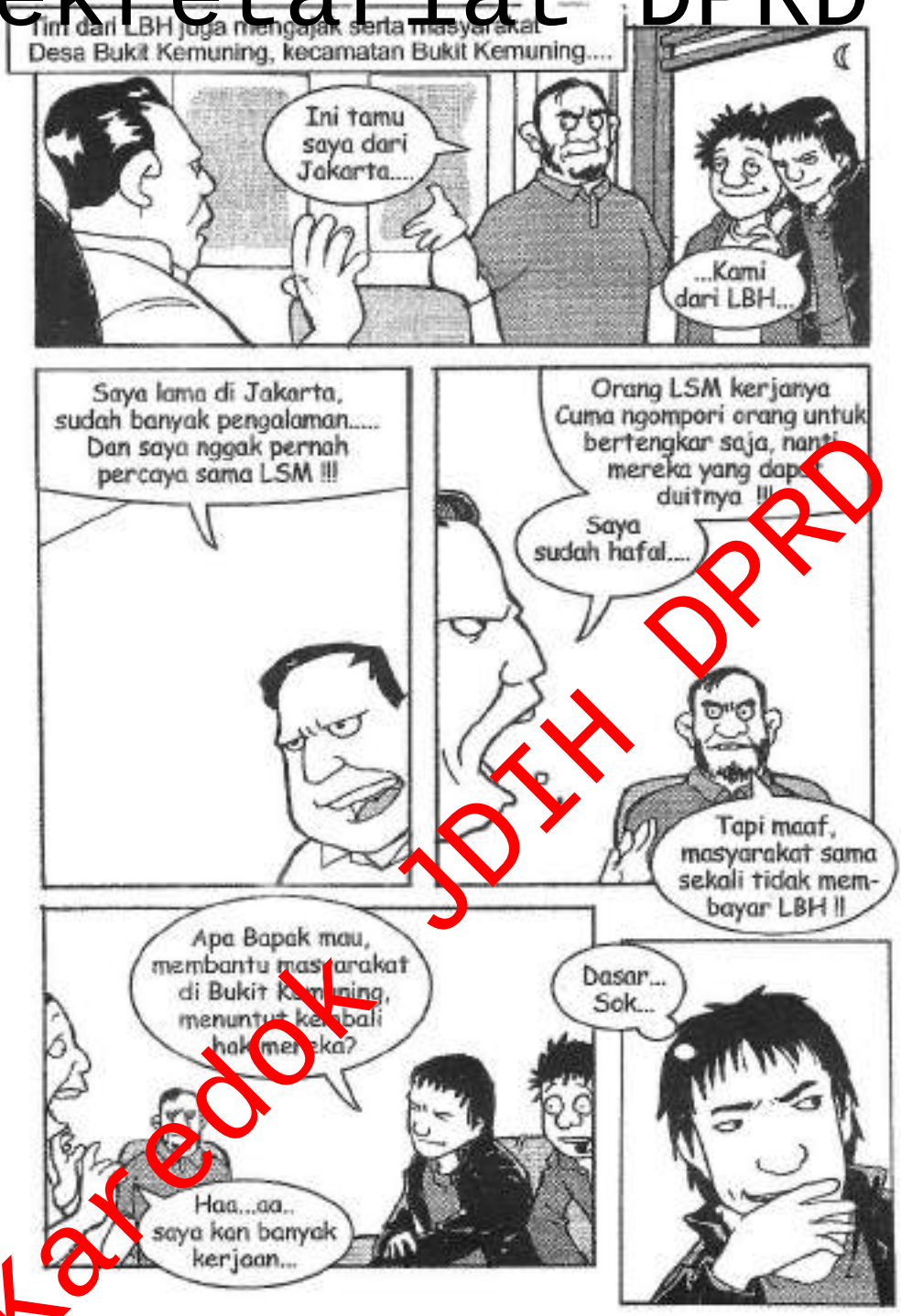
Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



JDIH DPRD
Karedok

Sekretariat DPRD

Pertemuan warga antar desa juga dilakukan di kecamatan. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Sobiyi, konsultan PPK tingkat kecamatan.



Kareqok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Kaledok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



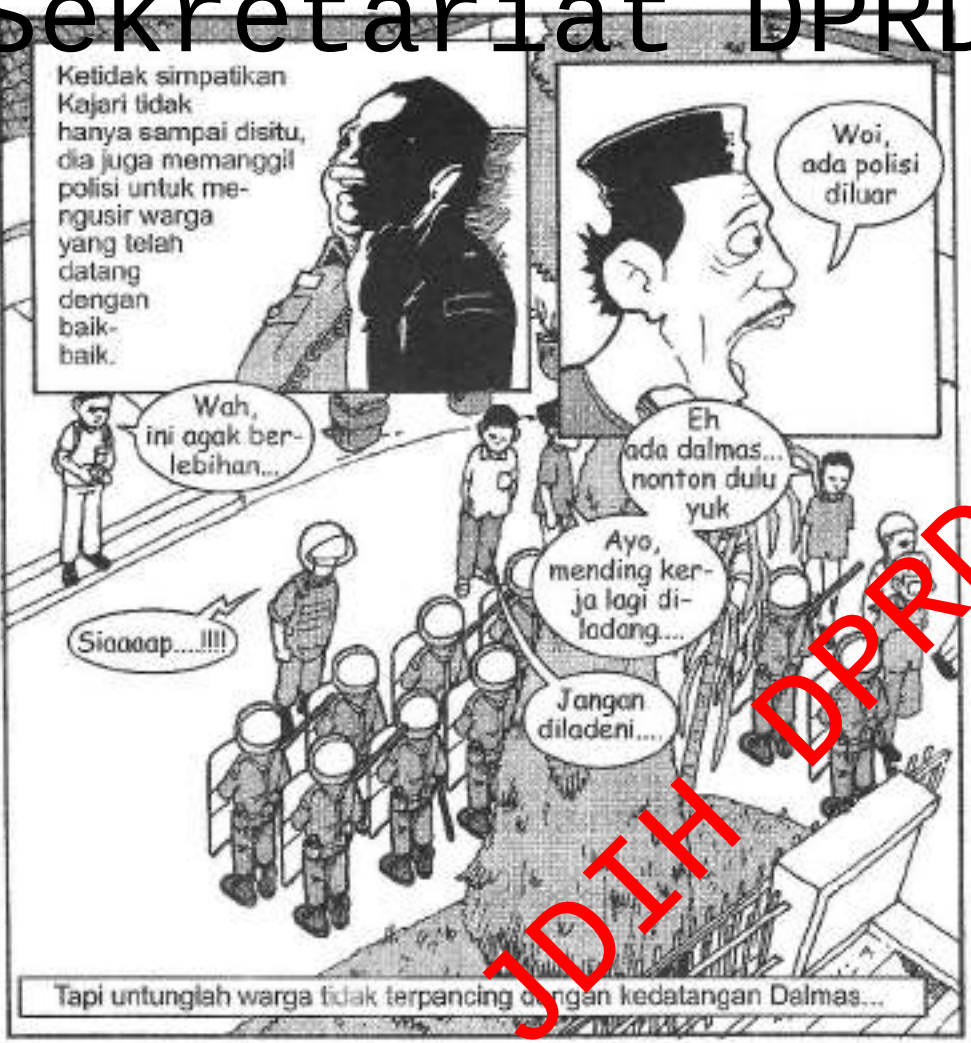
Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD





Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD

Besoknya

Berita kejadian di Kejaksaan Negeri Lampung Utara dimuat di harian Lampung Post

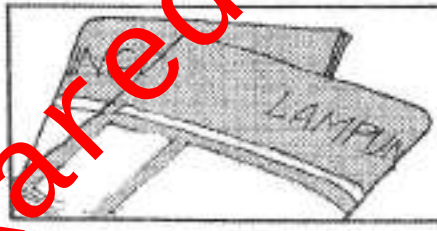
Ada foto-ku ndak?

Awal Oktober 2001.

Dua orang dari konsultan nasional PPK melakukan kunjungan lapangan kembali

Kalau kasus ini tidak segera dilimpahkan ke pengadilan hingga akhir bulan ini...

Kami akan merekomendasikan Bank Dunia agar tidak mengikutkan Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan PPK tahun depan.



Kembali Lampung Post memberitakan perkembangan kasus korupsi Bukit Kemuning, tentang ancaman dari Konsultan Nasional PPK.

Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD

17 November 2001 kasus dugaan korupsi mantan camat Bukit Kemuning mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Kotabumi. Beberapa warga datang bersama sama. Naik kendaraan sewaan, beberapa naik sepeda motor, mereka meninggalkan pekerjaannya untuk bisa datang ke sidang.





Kaledok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Kareodok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

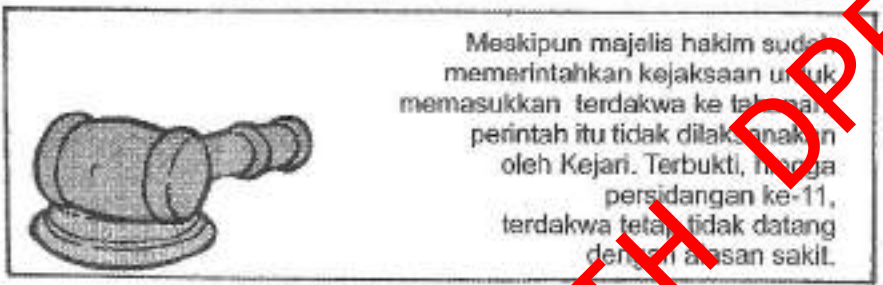
Sekretariat DPRD



JDIH DPRD
Karedok

Sekretariat DPRD







karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



JDIH DPRD
Karedok

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD







Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



JDIH DPRD
Karedok

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD

Hari itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung Utara memutuskan:

- Mantan Camat Bukit Kemuning dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidanan korupsi;
- Dikenai sanksi pidana penjara selama 1 tahun;
- Diwajibkan membayar denda pada negara sebesar Rp 50 juta;
- Diwajibkan membayar ganti rugi kepada masyarakat desa PPK sebesar Rp 125 juta, dengan penggantian pidana penjara 1 tahun untuk tiap-tiap Rp 25 juta ganti rugi yang tidak dibayarkan.



Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD

Tentang
Justice for the Poor Project
Bank Dunia

Justice for the Poor Project (selanjutnya disingkat *Justice*) merupakan inisiatif dari Bank Dunia, yang dimulai sejak Juni 2002 dengan tujuan memperbaiki akses masyarakat, terutama kelompok miskin, terhadap keadilan, melalui mekanisme informal maupun formal. Justice melakukan penelitian lapangan di Indonesia untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi dan apa yang diharapkan oleh kelompok masyarakat miskin dari lembaga hukum dengan tujuan memahami dukungan apa yang mungkin diberikan demi mendorong terjadinya reformasi hukum di tingkat lokal. Justice lebih menujukan reformasi hukum dengan perspektif dari masyarakat yang menjadi tujuan hukum tersebut, daripada terhadap institusi atau kerangka kerja hukumnya sendiri. Justice juga mengambil pelajaran dari dan membantu mendesain, pelatihan paralegal dan penyediaan pengacara bantuan hukum *pro bono* bagi masyarakat kurang mampu dalam rangka pelaksanaan beberapa proyek Bank Dunia yang telah ada.

Justice berusaha mencari strategi guna menggerakkan reformasi hukum di tingkat sub-nasional, terutama melalui pembukaan akses hukum yang lebih baik bagi masyarakat miskin yang pada gilirannya akan berdampak pula bagi perbaikan berbagai agenda reformasi pemerintahan di tingkat nasional. Dari berbagai kegiatan Justice diharapkan akan diidentifikasi berbagai pengalaman sukses dalam penggunaan sistem hukum sekaligus mengidentifikasi lokasi-lokasi di mana reformasi hukum bisa berjalan.

Tujuan Umum & Kegiatan

Justice melaksanakan serangkaian kajian analitis dan kegiatan pendampingan yang didesain untuk mewujudkan tiga tujuan:

Pertama, meningkatkan pengetahuan hukum dan memudahkan akses masyarakat ke bantuan hukum. Kedua, meningkatkan transparansi/pengawasan atas proses hukum formal. Dan terakhir, meningkatkan fungsi dan memperluas akses ke mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Justice, untuk merealisasi tiga tujuan pokok tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga aktivitas, yakni:

Kareedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD

Riset

Dilakukan dengan bentuk studi kasus serta penulisan makalah analitis. Sampai saat ini telah didekati sekitar 50 studi kasus, dimana masyarakat miskin melakukan upaya mempertahankan hak dan kepentingannya dengan menggunakan sistem hukum, maupun dengan menggunakan mekanisme tradisional atau non-negara di tingkat lokal.

Makalah analitis yang telah diselesaikan adalah: Keadilan di desa-desa Indonesia: Studi Kasus tentang Akses terhadap Keadilan, Demokrasi dan Pemerintahan Desa (*Village Justice in Indonesia*), Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Aspirasi Reformasi Hukum di Tingkat Lokal (*Mapping Reformers*). Keduanya telah dipublikasi dalam bentuk buku berjudul "MENCIPTAKAN PELUANG KEADILAN". Sedangkan yang masih dalam proses studi dan/atau penulisan adalah: Peradilan Otonom di Desa (*Village Judicial Autonomy*), Kajian Peraturan Daerah (*Review* Perda), Kajian Korupsi DPRD, serta Akses Perempuan terhadap Keadilan melalui Pengadilan Agama.

Operasional

Kerja-kerja operasional dimaksudkan demi penguatan kapasitas lokal untuk menyelesaikan konflik secara terbuka, independen serta dengan cara yang adil, dan untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada dan akses terhadap sektor hukum dan keadilan. Kerja operasional ini tidak terbatas berkenaan dengan proyek-proyek pengembangan masyarakat yang ada di Bank Dunia, melainkan juga yang berdiri sendiri. Yang sedang dikembangkan antara lain: komponen hukum dan penyelesaian sengketa di *Support for Poor & Disadvantaged Areas Program*/SPADA (hasil pengembangan pilot proyek bantuan hukum bagi masyarakat di Program Pengembangan Kecamatan/PPK), pemberdayaan hukum bagi perempuan di Program Penguatan Perempuan Kepala Keluarga/PEKKA, dan pemberian bobot pengembangan keadilan di program pengabdian masyarakat di perguruan tinggi (*Student Community Advocates Program*).

Disamping itu, Justice juga memberi dukungan kegiatan guna meningkatkan keterbukaan dan transparansi di sektor hukum dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap putusan pengadilan, mendukung kursus singkat hukum untuk para jurnalis dan LSM, serta mendukung kelompok-kelompok pemantau peradilan.

Kopi dok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD

Kemitraan

Sebagai tindak lanjut dari studi *Mapping Reformers*, Justice mengupayakan terjadinya jejaring di antara para reformis dalam sistem hukum dalam rangka memperkuat sekaligus masing-masing pribadi para reformis itu, maupun dalam kapasitasnya secara kolektif untuk menumbuhkan inisiatif-inisiatif pembaruan. Berbarengan dengan upaya tersebut, di luar sistem hukum juga diupayakan terjadinya koalisi lembaga swadaya masyarakat, media massa dan masyarakat sipil yang diarahkan sebagai *pressure group* serta *watchdog* agar sistem formal hukum berjalan semakin efektif. Dan yang tak kalah pentingnya adalah fasilitasi inisiatif dalam mempromosikan reformasi hukum di tingkat lokal, dengan menyediakan jasa-jasa informasi, pendampingan serta pembukaan akses terhadap sumber-sumber pendanaan bagi kelompok-kelompok yang berkehendak mengimplementasikan inisiatif lokal bagi pembaruan hukum.

Alamat:

Justice for the Poor - The World Bank
Jl. Diponegoro No. 72, Menteng
Jakarta Pusat 10310
Tel. (021) 314 8475
Fax. (021) 3190 3090

Email:

Alpian: piuk78@yahoo.com
Bambang Soetono: bsoetono@wboj.or.id
Dewi Novirianti: dnovirianti@wboj.or.id
Matt Stephens: mstephens@worldbank.org
Pari Umar Farouk: pfarouk@wboj.or.id
Philippa Venning: pvenning@wboj.or.id
Samuel Clark: sclark@wboj.or.id
Taufik Rinaldi: trinaldi@wboj.or.id

Karedok JDIH DPRD

Sekretariat DPRD S



Karedok JDIH DPRD S

PENGAYOMAN

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jl. Mayjen Soetoyo
Cililitan Jakarta Timur
Tel. (021) 8091908
Fax. (021) 8011755

The World Bank
www.worldbank.or.id

Justice for the Poor - The World Bank
Jl. Diponegoro No. 72, Menteng
Jakarta Pusat 10310
Tel. (021) 314 8175
Fax. (021) 3190 3090